



MENANAM BENIH DI LADANG TANDUS

**POTRET SISTEM PRODUKSI GURU AGAMA ISLAM
DI INDONESIA**

Research on System of Producing Religious Teachers
CISForm Yogyakarta – PPIM UIN Jakarta

MENANAM BENIH DI LADANG TANDUS
Potret Sistem Produksi Guru Agama Islam
di Indonesia

CISForm UIN Yogyakarta - PPIM UIN Jakarta

CONVEY REPORT

Menanam Benih di Ladang Tandus: Potret Sistem
Produksi Guru Agama Islam di Indonesia

Vol. 2 | No. 4 | Tahun 2019

Tim Peneliti:

Muhammad Wildan (Koordinator)
Abdur Rozaki (Anggota)
Ahmad Muttaqin (Anggota)
Ahmad Salehudin (Anggota)
Alimatul Qibtiyah (Anggota)
Fatimah Husein (Anggota)
Rahmad Hidayat (Anggota)
Sekar Ayu Aryani (Anggota)
Sukiman (Anggota)

Penerbit:

CISForm

Center for the Study of Islam and Social Transformation
Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga
Jln. Marsda Adisucipto Yogyakarta 55281
Email: cisform@uin-suka.ac.id
Website: cisform.uin-suka.ac.id

KATA PENGANTAR

CONVEY REPORT ini ditulis untuk memberikan gambaran secara singkat kepada khalayak luas mengenai temuan-temuan penelitian Center for the Study of Islam and Social Transformastion (CISForm) UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta di 19 Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI) yang tersebar 8 wilayah di Indonesia. Penelitian dengan judul Sistem Produksi Guru Agama Islam dan Tantangan Keberagamaan di Indonesia ini dilaksanakan dengan bekerjasama dengan Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat (PPIM) UIN Syarif Hidayatullah Jakarta di bawah program Convey2.

Secara desain dan isu yang dipilih, penelitian ini merupakan satu bagian puzzle dari map besar penelitian yang diinisiasi oleh CONVEY dan PPIM UIN Jakarta untuk melihat perkembangan fenomena keberagamaan di Indonesia. Jika penelitian sebelumnya berfokus pada fenomena menguatnya intoleransi dan radikalisme yang terjadi di lembaga pendidikan, seperti intoleransi dan radikalisme di OSIS dan pandangan keagamaan guru, maka penelitian ini berupaya untuk mengungkap bagaimana sistem produksi guru agama Islam bekerja sehingga melahirkan guru-guru agama yang berpotensi intoleran dan radikal.

CISForm mengucapkan terima kasih kepada para peneliti-peneliti senior PPIM UIN Jakarta: Prof. Dr. Jamhari Makruf, Dr. Saiful Umam, Dr. Fuad Jabali, Dr. Didin Syafruddin, Prof. Dr. Oman Fathurrahman, Dr. Ismatu Ropi, Dr. Jajang Jahroni, dan segenap tim yang telah mengawal survei ini mulai dari pembuatan instrumen, pengambilan data, konsinyering, penulisan laporan, sampai dengan diseminasi hasil penelitian. Selanjutnya kami ucapkan terima kasih juga kepada Pak Didin Syafruddin selaku program officer yang telah membaca dengan teliti dan memberikan masukan terhadap naskah CONVEY REPORT ini.

CONVEY Indonesia
CISForm UIN Yogyakarta - PPIM UIN Jakarta

Terakhir, kami berikan apresiasi setinggi-tingginya kepada tim peneliti CISForm UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah bekerja dengan keras, mencurahkan waktu, tenaga, dan pikirannya selama hampir enam (6) bulan untuk melakukan penelitian ini. Tidak lupa juga kami ucapkan terima kasih kepada para Research Assistant (RA) lokal yang sudah membantu dan berjuang dalam pengambilan data di lapangan. Penelitian ini merupakan buah dari kerja keras mereka semua. Semoga CONVEY REPORT ini bisa memberikan sumbangsih pengetahuan yang up to date tentang sistem pendidikan agama Islam dan berbagai dinamikanya, termasuk tantangan keberagaman di Indonesia sekarang ini.

Yogyakarta, 31 Januari 2019

DAFTAR ISI

Kata Pengantar | iii

Daftar Isi | v

Ringkasan Eksekutif | vii

- I. LATAR BELAKANG | 1
- II. FOKUS KAJIAN, TEORI DAN METODOLOGI | 3
 - Perspektif Teoretis | 3
 - Metode Penelitian | 6
- III. PROGRAM STUDI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DI INDONESIA | 9
 - A. Filosofi dan Kebijakan Pendidikan | 11
 - B. Input dan Rekrutmen Mahasiswa | 13
 - C. Kompetensi Bahasa Arab dan Keagamaan | 14
 - D. Pendidikan Kritis | 19
 - E. Kegiatan Keagamaan di Lingkungan Kampus | 21
 - F. Memudarnya Moderatisme Beragama | 24
- IV. TANTANGAN ISLAMISME | 26
- V. KESIMPULAN | 31

Daftar Pustaka | 34

Tentang CISForm | 37

CONVEY Indonesia
CISForm UIN Yogyakarta - PPIM UIN Jakarta

RINGKASAN EKSEKUTIF

Latar Belakang

Sejumlah penelitian mutakhir tentang radikalisme menunjukkan adanya keterkaitan antara guru dengan tumbuh suburnya intoleransi dan radikalisme di kalangan anak muda (PPIM 2016, 2017, 2018; MAARIF Institute, 2017). Peran guru agama Islam, buku pelajaran, dan kegiatan-kegiatan penopangnya di sekolah, dapat diduga tidak memiliki daya dalam mengantisipasi dan membendung infiltrasi paham intoleransi dan radikalisme ke lingkungan sekolah. Potret buram intoleransi di kalangan siswa dan guru agama di sekolah tersebut secara khusus menandakan bahwa ada masalah serius dalam proses produksi dan pembinaan guru-guru PAI.

Kondisi tersebut memunculkan sejumlah pertanyaan besar: Dari mana sumber pandangan intoleransi para siswa dan guru agama tersebut berasal? Adakah yang salah dalam sistem produksi guru agama selama ini? Apa saja yang telah dilakukan oleh Prodi Pendidikan Agama Islam di PTKI selama ini, baik negeri dan swasta, untuk memproduksi guru PAI yang moderat, toleran dan menguasai ilmu agama secara baik? Tantangan dan hambatan apa saja yang ada dalam memproduksi guru PAI yang profesional dan berkualitas? Penelitian ini secara khusus mengkaji Sistem Produksi Guru Agama Islam Di Indonesia.

Fokus Kajian

Penelitian ini dilakukan berdasarkan asumsi bahwa terdapat hubungan kuat antara pandangan intoleran dan kecenderungan radikal yang ditemukan secara signifikan di kalangan guru agama dan

pelajar SMA-sederajat dengan pelaksanaan pendidikan bagi calon guru agama di prodi PAI di PTKI. Oleh karena itu, beberapa pertanyaan mendasar yang berusaha untuk dijawab dalam penelitian ini. *Pertama*, Bagaimana sistem produksi guru Pendidikan Agama Islam? *Kedua*, Bagaimana kompetensi keislaman calon guru Pendidikan Agama Islam? Dan *ketiga*, Bagaimana pandangan dan sikap keagamaan mahasiswa calon guru Pendidikan Agama Islam, terutama terkait dengan isu-isu intoleransi dan radikalisme?

Metode Penelitian

Lokasi penelitian dipilih secara *purposive* di 19 PTKI di delapan wilayah. Responden survei dan wawancara/FGD juga dipilih dengan kriteria: dosen yang mengajarkan mata kuliah keislaman dan mahasiswa di semester V dan/atau VII. Penelitian ini menerapkan *mixed-methods* dengan mengaplikasikan lima teknik penggalan data, yaitu: 1) review dokumen, 2) survei, 3) *Focus Group Discussion* (FGD), 4) *semi-structured interview*, dan 5) observasi.

Temuan Penelitian

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem produksi calon guru agama Islam pada Prodi PAI saat ini secara umum memiliki daya tahan yang rendah dan rentan terhadap pengaruh dan arus intoleransi dan radikalisme. Hal tersebut terkait dengan temuan-temuan penelitian. *Pertama*, *raw input* dan proses rekrutmen mahasiswa PAI belum mampu menjaring calon-calon mahasiswa yang sesuai karakteristik prodi PAI. Hasil survei menunjukkan bahwa secara berurutan persentase mahasiswa PAI masuk melalui jalur Mandiri (52,2%), SPAN-PTKIN (21,4%), dan UM-PTKIN 17,4%. Khusus PMB di PTKIN (PTKIS mayoritas hanya melalui jalur Mandiri), urutannya adalah SPAN-PTKIN (43,5%), UM-PTKIN (32%), dan Mandiri (21,6%). Jalur SPAN-PTKIN yang “hanya” lihat nilai rapor dan hasil Ujian Nasional (UN) telah memberikan peluang pada calon mahasiswa dari SMA/SMK umum yang mempunyai nilai Ujian Nasional (UN) relatif lebih tinggi, dan kurang memberikan preferensi bagi alumni-alumni MA dan SMA Islam/pesantren yang memiliki pengetahuan agama yang lebih memadai.

Kedua, kebijakan dan filosofi pendidikan. Secara umum dapat dikatakan bahwa problem yang dihadapi Prodi PAI saat ini karena ketidakjelasan kebijakan dan landasan filosofis pendidikan yang diadopsi. Hal ini dapat dilihat dari kurikulum pendidikan yang cenderung lebih berorientasi pada kemampuan pedagogis.

Ketiga, kapasitas penguasaan ilmu agama terutama bahasa Arab dan sikap keagamaan civitas akademika prodi PAI. Secara umum, persepsi dosen tentang kemampuan berbicara bahasa Arab dengan baik hanya 36,1% dan kemampuan membaca teks Arab dengan baik adalah 43,2%. Sedangkan kompetensi membaca teks bahasa Arab mahasiswa PAI dengan kategori baik hanya 18%. Berdasarkan sikap keagamaan dosen, didapatkan data 14,2% dosen PAI setuju bahwa Islam hanya bisa tegak dengan sistem negara Islam dan 16,6% dosen setuju penggunaan kekerasan dalam membela agama. Sedangkan data survei pada mahasiswa, opini terhadap sistem negara cukup mengkhawatirkan. Walaupun secara umum mahasiswa PAI mempunyai persepsi yang tinggi bahwa Pancasila sesuai dengan nilai-nilai Islam, ada 10% mahasiswa yang tidak setuju. Temuan lainnya adalah terdapat 47,5% mahasiswa setuju bahwa Islam hanya bisa tegak dengan sistem negara Islam.

Keempat, proses kegiatan belajar mengajar (KBM) kurang mendorong cara berpikir kritis pada mahasiswa PAI. Pada kurikulum maupun silabus, tidak ditemukan unsur pendidikan sikap kritis, sehingga ketika dibenturkan dengan praktik pembelajaran, para mahasiswa cenderung berpikir sempit. *Kelima*, kegiatan keagamaan di lingkungan kampus cenderung mendorong tumbuh suburnya pandangan keagamaan yang mengarah pada konservatisme dan ketertutupan dalam agama. *Keenam*, melemahnya moderasi dalam beragama. Moderasi sikap agama yang selama ini menjadi penopang dan pemikiran keagamaan di kampus kini seakan-akan sudah mulai tergerus ke arah yang cenderung konservatif bahkan radikal.

Rekomendasi

1. Perlunya penyempurnaan sistem seleksi calon penerimaan mahasiswa baru. Sedikitnya tiga hal yang perlu dilakukan. **Pertama**,

melalui jalur prestasi dengan kriteria yang disesuaikan dengan kualifikasi profil lulusan PAI. **Kedua**, materi dalam sistem seleksi melalui jalur tes harus dapat mengukur kemampuan penguasaan dasar keislaman yang kuat. **Ketiga**, perlu instrumen untuk mengukur aspek kecenderungan sikap keagamaan calon mahasiswa agar diperoleh peserta didik yang memiliki pemahaman keagamaan yang moderat.

2. Perlu adanya redesain kurikulum yang memungkinkan mahasiswa PAI memiliki pengetahuan keislaman yang mendalam tanpa kehilangan kemampuan pedagogis yang dibutuhkan.
3. Perlunya standarisasi kemampuan bahasa Arab bagi mahasiswa PAI.
4. Perlunya menanamkan sikap moderasi beragama dan sikap toleran, misalnya dengan menambahkan muatan mata kuliah studi agama-agama, multikulturalisme, perbandingan mazhab, mata kuliah keislaman kritis, dan logika atau ilmu mantik.
5. Perlunya dirumuskan kebijakan untuk mengembangkan sikap moderasi keagamaan yang kuat dan mencegah berkembangnya Islam intoleran dan radikal di lingkungan kampus.

MENANAM BENIH DI LADANG TANDUS POTRET SISTEM PRODUKSI GURU AGAMA ISLAM DI INDONESIA

I. LATAR BELAKANG

Khususnya sejak tahun 2016, dunia pendidikan dan keagamaan Indonesia tersentak perhatiannya pada indikasi merebaknya paham dan sikap radikalisme dan ekstremisme di kampus-kampus. Paham-paham tersebut dapat diduga telah menyusup di perguruan tinggi, tidak hanya di antara para mahasiswa, tetapi juga dosen dan pejabat kampus. Paham-paham tersebut merambah sekolah dan kampus melalui berbagai celah, seperti kegiatan ekstrakurikuler keagamaan, konten buku ajar, dan alumni yang berafiliasi dengan gerakan yang mengarah pada paham intoleran dan radikal (Wahid Foundation, 2016; Hairus Salim HS, Najib Kailani, dan Nikmal Azekiyah, 2011; PPIM UIN Jakarta, 2016; PPIM UIN Jakarta, 2018).

Sejumlah riset menemukan tingginya potensi radikalisme dan ekstremisme di kalangan generasi muda muslim. Temuan PPIM UIN Syarif Hidayatullah (2017, 2018) dan Maarif Institute (2017) menunjukkan bahwa anak-anak muda merupakan sasaran empuk penyebaran paham-paham radikal di lingkungan institusi pendidikan. Salah satu indikasinya adalah mulai pudarnya semangat kebhinekaan dan toleransi terhadap kelompok yang berbeda (baik inter maupun antaragama), serta terhadap kelompok yang dianggap sesat menurut pemahaman yang mereka yakini. Hasil riset PPIM (2017) terhadap siswa, mahasiswa, guru, dan dosen di 34 provinsi di Indonesia di antaranya menemukan bahwa 49% siswa/mahasiswa tidak setuju jika pemerintah harus melindungi penganut aliran yang dianggap sesat (Syi'ah dan Ahmadiyah), dan 86% siswa/mahasiswa setuju jika pemerintah melarang keberadaan

kelompok-kelompok minoritas yang dianggap menyimpang dari ajaran Islam.

Fakta lain yang terungkap dari penelitian PPIM adalah bahwa 38% siswa/mahasiswa, dan 18% guru/dosen setuju bahwa jihad itu bermakna perang melawan non-Muslim; 16% siswa/mahasiswa dan 7% guru/dosen setuju bahwa bom bunuh diri itu termasuk jihad; serta 343% siswa/mahasiswa dan 19% guru/dosen setuju bahwa orang yang murtad boleh dibunuh. Data tersebut menunjukkan bahwa adanya potensi intoleransi dan ekstremisme yang cukup memprihatinkan di kalangan siswa dan mahasiswa maupun guru/dosen.

Studi yang dilakukan Maarif Institute (2017) terhadap kebijakan OSIS di beberapa sekolah menemukan persoalan serius di lingkungan pendidikan terkait dengan masuknya paham radikal ke sekolah (SMA dan Madrasah Aliyah, swasta dan negeri). Beberapa temuan penting penelitian ini antara lain rentannya lembaga pendidikan terhadap politisasi agama, padahal institusi pendidikan tersebut memiliki posisi strategis dalam membentuk karakter bangsa (Maarif, 2017). Penelitian tersebut juga menemukan kelemahan yang dihadapi oleh sekolah, termasuk infiltrasi organisasi ekstra yang bercorak radikal, peran guru dalam proses belajar mengajar, dan kebijakan dan peran sekolah (baik kepala sekolah, guru, pengurus OSIS, maupun komite sekolah) yang lemah dalam mengontrol masuknya paham radikalisme agama.

Hasil penelitian PPIM (2017, 2018) dan MAARIF Institute (2017) di atas menunjukkan adanya keterkaitan antara peran guru dan tumbuh suburnya intoleransi dan radikalisme di kalangan anak muda. Komponen sekolah seperti guru agama Islam, buku pelajaran, dan kegiatan-kegiatan penopangnya, relatif lemah dalam menghadang dan melawan paham intoleransi dan radikalisme di sekolah. Potret buram intoleransi di kalangan siswa dan guru agama di sekolah tersebut menunjukkan ada yang tidak beres dalam proses produksi dan pembinaan guru-guru PAI. Hal ini memunculkan berbagai pertanyaan besar, seperti: dari mana sumber pandangan intoleransi para siswa dan guru agama tersebut berasal? Adakah yang salah dalam proses produksi guru agama selama ini? Apa saja yang telah dilakukan oleh Prodi Pendidikan Agama Islam di PTKI selama ini, baik negeri dan

swasta, untuk memproduksi guru PAI yang moderat? Tantangan dan hambatan apa saja yang mungkin ada dalam memproduksi guru PAI yang profesional dan berkualitas?

II. FOKUS KAJIAN, TEORI, DAN METODOLOGI

Penelitian ini dilakukan dengan asumsi bahwa terdapat hubungan kuat antara pandangan intoleran dan cenderung radikal yang ditemukan secara signifikan di kalangan guru agama dan pelajar SMA-sederajat dengan pelaksanaan pendidikan bagi calon guru agama di prodi PAI. Hal ini dipengaruhi oleh berbagai faktor mulai dari ranah kebijakan, input calon mahasiswa, proses pendidikan, SDM, hingga lingkungan di sekitar kampus. Untuk itu, penelitian ini berusaha menjawab pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana sistem produksi guru Pendidikan Agama Islam?
2. Bagaimana kapasitas pengetahuan dan sikap keagamaan mahasiswa Prodi PAI?
3. Bagaimana pandangan dan sikap keagamaan mahasiswa calon guru Pendidikan Agama Islam, terutama terkait dengan isu-isu intoleransi dan radikalisme?

Untuk itu, penelitian ini bertujuan untuk: 1) mengidentifikasi dan menganalisis unsur-unsur sistemik dan non-sistemik di PTKI yang berkontribusi pada inkompetensi dan sikap eksklusif di kalangan mahasiswa calon guru agama Islam (PAI). 2) mengidentifikasi pandangan dan sikap keagamaan mahasiswa PAI khususnya terhadap isu intoleransi, radikalisme, dan ekstremisme. 3) mengidentifikasi sumber atau elemen eksternal lainnya, termasuk praktik pendidikan di luar kelas atau program resmi PAI, yang berkontribusi pada pembentukan kapasitas dan sikap keagamaan mahasiswa calon guru PAI.

Perspektif Teoretis

Secara konseptual, lembaga pendidikan merupakan elemen penting dalam pelanggaran nilai-nilai sosial, politik dan kultural yang diyakini dan dihayati oleh masyarakat. Sekolah misalnya, melalui kurikulum, pedagogi dan kegiatan belajar mengajar sehari-hari di

dalam kelas memainkan peran krusial dalam mempertahankan dan menguatkan nilai-nilai yang dianut (Apple, 1979). Lembaga pendidikan dapat berjalan dengan baik dalam mengemban fungsi budaya dan perwujudan ideologi yang mempertahankan dan mendukung relasi struktural yang tengah berlangsung. Hal ini karena, menurut Apple (1979), lembaga pendidikan berdiri dalam kesaling-terhubungan dengan institusi lain yang lebih berpengaruh. Lembaga-lembaga dalam banyak konteks mengakumulasi ketidaksetaraan struktural dan kultural. Ini artinya, keberadaan sistem pendidikan di sebuah lembaga penyedia pendidikan tidak bisa dilepaskan dari berbagai dinamika dan atmosfer kultural, politik, dan sosial yang berada di luar sekolah, khususnya persoalan-persoalan yang melibatkan lembaga yang lebih berpengaruh, seperti lembaga agama dan negara.

Dalam konteks Indonesia, lembaga pendidikan adalah bagian dari sistem yang berperan besar dalam menyebarkan ideologi kekuasaan (kebangsaan). Pendidikan tidak hanya mengandung permasalahan pendidikan, tetapi juga ideologi politik (Apple, 2004). Lembaga-lembaga pendidikan di Indonesia, khususnya PTKI, diharapkan bisa mentransmisikan nilai-nilai Pancasila dan Islam moderat kepada mahasiswa. Dengan demikian, mahasiswa adalah bagian dari sistem struktural pemerintah dalam menyebarkan nilai-nilai Islam moderat sebagaimana yang dianut oleh negara.

Di dalam tatanan sistem pendidikan di Indonesia, guru sekolah menjadi *actor intermediary* yang menjembatani proses transformasi kesadaran antara ideologi negara kepada para siswa di sekolah. Di dalam melakukan proses edukasi terhadap anak didiknya, guru merujuk pada kurikulum sebagai pengejawantahan nilai-nilai dan kepentingan nasional negara. Pesan negara di dalam melahirkan karakter dan sosok generasi seperti apakah yang ingin dihasilkan masuk di dalam kurikulum pendidikan sekolah. Guru dan kurikulum sekolah menjadi bagian dari representasi negara di sekolah, bahwa menurut bahasa Paulo Friere, melalui kurikulumlah, negara menjadi *the dominant order*.

Hanya saja, di tengah proses perkembangan demokrasi politik, liberalisasi pendidikan dan perkembangan teknologi informasi di Indonesia, peran pemerintah sebagai *the dominant order* kini tengah

mengalami fragmentasi. Guru di sekolah tidak semata-mata representasi Negara, tetapi juga beragam kepentingan yang secara dinamis mempengaruhinya, seperti keyakinan agama, identitas politik dan faktor-faktor lainnya. Tantangan pendidikan di era multikultural seperti saat ini jauh lebih berat karena generasi muda memiliki "kerentanan" identitas, yaitu identitas etnis, nasional, dan trans-nasional. Dalam konteks ini peran guru agama Islam sangat penting untuk menjadi *intermediary* tidak hanya antara agama dan negara, tetapi juga nilai-nilai modernitas (Jackson, 2004).

Hasil riset yang dilakukan oleh Maarif Institute (2017) menjelaskan bahwa adanya pengaruh budaya masyarakat setempat dengan dinamika pendidikan di sekolah. Guru dalam konteks yang spesifik, dengan demikian, mencerminkan representasi karakter keberagaman dari basis sekolah di lingkungannya. Hasil penelitian yang menunjukkan tentang banyaknya guru, termasuk dari aparat sipil negara (ASN), terlibat dalam mempromosikan nilai-nilai intoleransi, eksklusivisme, dan bahkan radikalisme keagamaan dapat dijelaskan dalam konteks ini.

Guru dan lingkungan sosial keagamaan masyarakat mencerminkan dialektika baru dalam proses pembentukan pengetahuan dan kesadaran keagamaan siswa di sekolah. Dalam persoalan ini, guru memiliki legitimasi kuat dari lingkungan sekolah dalam memainkan pengetahuan ideologis, meski harus berseberangan dengan ideologi negara dalam membangun proyeksi keagamaan para siswa. Ketika swastanisasi pendidikan makin massif, dan bahan bacaan pelajaran di sekolah tidak lagi tunggal yang mengacu pada bahan kurikulum di sekolah, negara semakin kehilangan kontrol terhadap ideologi guru di sekolah. Guru dan siswa semakin adaptif dengan model pembelajaran yang memanfaatkan teknologi informasi dalam mencari berbagai macam sumber informasi. Dalam kondisi demikian, guru dan siswa tidak saja secara pasif menerima pengetahuan, tetapi secara "bebas" untuk memilah dan memilih pengetahuan yang dikehendaki, termasuk yang mungkin saja bertentangan dengan "kepentingan" negara.

Dalam diskusi tentang problematika pendidikan agama dalam masyarakat majemuk, Barnes (2014) mengemukakan bahwa kegagalan pendidikan agama konvensional yang menekankan pada

klaim identitas dan kebenaran tunggal menyebabkan keterputusan antara pendidikan agama dan pendidikan moral. Pendidikan agama untuk masyarakat plural, menurut Barnes (2014), seharusnya berorientasi pada pendidikan moral, khususnya yang ditujukan untuk merespons isu-isu moral kontemporer di tengah masyarakat. Pendidikan agama memiliki peran sentral dalam perkembangan moral siswa, yaitu dalam memberikan kerangka moral alternatif bagi nilai sekularisme, dan membentuk moral prosedural yang mendominasi kebudayaan dan kehidupan publik di era modern. Selain itu, pendidikan agama kontemporer juga seharusnya terlibat penuh dalam merespons berbagai isu-isu intoleransi dan *prejudice* berdasar agama. Setiap agama, termasuk Islam, memiliki sumber dan rujukan dalam kitab suci dan sejarahnya untuk mendukung kebebasan dan penghargaan pada perbedaan keyakinan dan penentangan terhadap intoleransi dan *prejudice*.

Menurut Chisholm (1994) kompetensi budaya tidak dapat diperoleh dalam ruang akademik yang vakum. Kompetensi budaya berkembang melalui sebuah kombinasi pengetahuan, pengalaman lintas budaya secara langsung, ditambah refleksi atas pengalaman tersebut. Oleh karenanya, lingkungan perguruan tinggi yang mengapresiasi dan mempromosikan penghargaan pada perbedaan budaya sangatlah mendasar bagi tumbuhnya kompetensi budaya di kalangan komunitas perguruan tinggi yang bersangkutan.

Penelitian ini akan melihat sejauh mana kampus Prodi PAI di PTKI mampu menjadi bagian dari lembaga peneguh nilai-nilai negara dan penyemai pandangan agama yang moderat. Selain itu, riset ini juga akan menelusuri sejauh mana kurikulum, metode, proses belajar di Prodi PAI dan lingkungan kampus mampu menghasilkan guru-guru agama yang berorientasi pada pendidikan moral di tengah masyarakat multikultural.

Metode Penelitian

Subjek penelitian ini adalah individu-individu yang terlibat langsung dalam produksi guru PAI di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI), yaitu: 1) Dekan/Wakil Dekan/Ketua Prodi PAI, 2) dosen Prodi

PAI; dan 3) mahasiswa Prodi PAI. Kategori pertama dan kedua dipilih karena posisinya yang menjadi penentu bagi sistem dan pelaksanaan pendidikan guru PAI. Kategori ketiga dipilih karena kelompok ini adalah produk dari sistem dan pelaksanaan pendidikan tersebut serta potensi mereka sebagai calon-calon guru PAI. Pemilihan terhadap subjek penelitian khususnya dosen dan mahasiswa dilakukan secara *purposive* dengan mengandalkan jaringan kelembagaan dan personal.

Pemilihan kota dan PTKI juga dilakukan secara *purposive* di delapan lokasi, yaitu: 1) Padang, 2) Lampung, 3) DKI Jakarta- Banten, 4) Yogyakarta-Solo, 5) Malang, 6) Makassar, 7) Banjarmasin, dan 8) Lombok, Nusa Tenggara Barat. Ada dua pertimbangan dalam menentukan kota-kota tersebut sebagai lokasi penelitian. *Pertama*, kota besar yang merupakan atau berdekatan dengan daerah yang rentan intoleransi dan radikalisme. *Kedua*, PTKI penyelenggara prodi PAI yang secara historis dan struktur berpengaruh terhadap produksi agama di daerah tersebut.

Dari delapan (8) kota tersebut, dipilih 19 PTKI sebagai sampel penelitian, yaitu: 1) UIN Imam Bonjol Padang, 2) STAI Pengembangan Ilmu Al-Qur'an Padang, 3) UIN Raden Intan Lampung, 4) Universitas Muhammadiyah Lampung, 5) UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 6) UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, 7) Universitas Muhammadiyah Jakarta, 8) UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 9) Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 10) Institut Islam Mambaul Ulum Surakarta, 11) UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 12) Universitas Islam Malang (UNISMA), 13) UIN Antasari Banjarmasin, 14) IAI Darussalam Martapura, 15) UIN Alauddin Makassar, 16) Universitas Muslim Indonesia (UMI) Makassar, 17), UIN Mataram, dan 18) IAI Nurul Hakim Mataram. Selain itu, terdapat 1 PTKI tambahan, yaitu Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta yang hanya diterapkan survei kuantitatif.

Pemilihan sampel PTKI di masing-masing kota didasarkan beberapa kriteria yang bersifat fleksibel. **Pertama**, sampel PTKI ditentukan berdasarkan status negeri dan swasta untuk mempertimbangkan proporsionalitasnya. **Kedua**, sample PTKI ditentukan menurut periode penyelenggaraan prodi PAI (semakin lama akan mendapat prioritas). **Ketiga**, jumlah daya tampung dan lulusan prodi PAI setiap tahunnya.

Semakin besar daya tampungnya, PAI tersebut akan menjadi prioritas.

Penelitian ini menerapkan *mixed-methods* dengan mengaplikasikan lima teknik penggalian data: 1) Review dokumen, 2) Survei, 3) *Focus Group Discussion* (FGD), 4) *semi-structured interview*, dan 5) observasi. Tahap **pertama**, review dokumen meliputi kebijakan, silabus, kurikulum, buku ajar, dan Rencana Pembelajaran Semester (RPS). Tahap **kedua**, survei, dilakukan terhadap 169 responden dosen dan 981 responden mahasiswa. Responden dosen dipilih berdasarkan keberimbangan gender, senioritas dan mata kuliah yang diampu, sedangkan responden mahasiswa yang dipilih adalah semester V dan VII, dengan proporsionalitas gender. Tahap **ketiga**, *semi-structured interview* ini dilakukan terhadap 119 dosen dan FGD dilakukan terhadap 188 mahasiswa. Tahap **terakhir**, adalah observasi, baik itu di kelas maupun kegiatan-kegiatan keagamaan di lingkungan kampus.

Data hasil penelitian kemudian diorganisasi dan dianalisis menurut kebutuhan untuk merespons poin-poin tujuan penelitian. Analisis data akan fokus pada beberapa poin sebagai berikut:

- Filosofi dan Kebijakan Prodi PAI. Fokus ini meninjau landasan pemikiran yang menjadi rujukan sistem dan praktik pendidikan prodi PAI di PTKI, seperti komposisi mata kuliah pedagogis dan keagamaan pada kurikulum. Lebih jauh analisis ini melihat sejauh mana komposisi tersebut berkontribusi pada pembentukan sikap pelaku pendidikan PAI terhadap isu-isu kontemporer yang berkembang saat ini.
- Kapasitas bahasa dan sikap keberagaman dosen prodi PAI. Bagian ini mengeksplorasi dan mengidentifikasi sejauh mana kemampuan bahasa asing (khususnya bahasa Arab) dosen matakuliah keislaman di prodi PAI.
- Kemampuan bahasa dan sikap keberagaman mahasiswa Prodi PAI. Sangat penting melihat sejauh mana kemampuan mahasiswa (calon guru) PAI dalam penguasaan bahasa (khususnya bahasa Arab) dan pengetahuan dan pemahaman dasar keislaman. Kedua hal ini penting karena sebagai penopang kompetensi profesional (keislaman) dan pedagogis

mahasiswa/i calon guru agama.

- Kondisi dan aktivitas keagamaan di lingkungan kampus. Tataran ini mengeksplorasi dan mengidentifikasi berbagai komponen non-sistematis pada perguruan tinggi yang berkontribusi pada sikap keagamaan dosen dan mahasiswa di PTKI.
- Indeks Islamisme. Tahapan ini merupakan analisis menyeluruh dari hasil survei, FGD, interview, dan observasi berdasarkan indeks Islamisme.

III. PROGRAM STUDI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DI INDONESIA

Program Studi (Prodi) Pendidikan Agama Islam (PAI) Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI) di Indonesia seharusnya memiliki tujuan bukan hanya membentuk calon guru PAI yang memiliki pengetahuan dan pemahaman keislaman mendalam yang memiliki kemampuan mengajar (pedagogis) mumpuni, melainkan juga membentuk warga negara yang baik. PAI bukan hanya membangun umat yang kuat, tetapi juga membangun keutuhan NKRI dalam bingkai Pancasila. Dengan demikian, semakin tinggi tingkat keimanan dan ketakwaan masyarakat muslim Indonesia, seharusnya berkorelasi dengan semakin baik pula dalam menjadi warga negara Indonesia, yang berperikemanusiaan, demokratis dan bertanggung jawab secara menyeluruh (PPIM, 2016: 2).

Materi dalam PAI seharusnya juga menjadi sarana menciptakan siswa dan mahasiswa yang toleran dan moderat. Untuk itu, seyogyanya materi-materi dalam pembelajaran PAI memuat narasi yang kuat dalam menumbuhkan sikap toleran dan moderat tersebut. Prodi PAI sebagai produsen guru agama Islam di sekolah keberadaannya sangat strategis, khususnya dalam mentransmisikan nilai-nilai keislaman yang moderat dan toleran dalam bingkai NKRI yang multi agama dan multi budaya. Oleh karenanya, seyogyanya para pemangku kebijakan memberikan perhatian khusus terhadap prodi ini, tentu dengan tidak mengabaikan keberadaan prodi lainnya. Jika Prodi PAI mampu menghasilkan calon guru PAI yang memiliki pemahaman dan pengetahuan dasar keislaman yang moderat dan toleran, maka mereka akan menjadi agen penyebar

Islam yang toleran dan moderat. Namun jika guru PAI yang dihasilkan memiliki pengetahuan dan pemahaman keislaman yang intoleran dan radikal, maka mereka akan menjadi penyebar Islam yang intoleran dan radikal.

Secara general sebagai sistem, Prodi PAI yang sekarang ini dapat dikatakan berdaya tahan rendah bahkan sangat rentan atas merasuknya paham dan ideologi intoleran. Maka dari itu, keterbukaan pengelola sangat dituntut untuk dapat menghasilkan solusi yang benar-benar teruji. Pelibatan berbagai pihak, termasuk *outsider* dalam proses ini tidak perlu dianggap sebagai intervensi, melainkan dapat dipandang sebagai kepedulian terhadap masa depan Prodi PAI yang imbasnya pada masa depan bangsa dan negara Indonesia.

Sebagai sebuah sistem, problematika yang melanda Prodi PAI saat ini harus dilihat secara komprehensif, meliputi aspek kebijakan, kemampuan ilmu keagamaan, sikap keagamaan, dan daya pemikiran kritis dosen maupun mahasiswa di Prodi PAI terkait isu-isu radikalisme, intoleransi dan ekstremisme. Dengan melihat keterkaitan antar faktor penopang sistem produksi guru PAI tersebut, maka akan diketahui problem "kebocoran" yang saat ini dihadapi oleh prodi PAI, sehingga akan diketahui resep apa yang tepat untuk memperbaikinya.

A. Filosofi dan Kebijakan Pendidikan

Dilihat dari aspek-aspek konseptual yang berkontribusi pada lemahnya sistem produksi guru agama Islam di Indonesia, aspek-aspek meliputi ketidakjelasan filosofi pendidikan yang diadopsi, kebijakan kurikulum prodi, dan desain pendidikan dengan orientasi pedagogis yang kuat. Aspek-aspek ini bersifat mendasar karena sangat menentukan tujuan, bentuk, dan praktik penyelenggaraan Prodi PAI dalam mewujudkan profil lulusan. Pemahaman tentang makna terdalam pendidikan, atau filosofi pendidikan, adalah fondasi pelaksanaan pendidikan yang menentukan bentuk, arah dan tujuan pelaksanaan aktivitas pendidikan (Lukens-Bull, 2005).

Dalam berbagai temuan, tidak ditemukan indikasi yang menunjukkan diberlakukannya suatu landasan pemikiran dan filosofis

mengenai pendidikan yang menjadi acuan bersama dalam desain, kurikulum, silabus, dan metode pengajaran. Desain, metode dan praktik pengajaran untuk calon guru agama Islam dilaksanakan dengan dasar pemikiran yang tidak padu dan koheren yang menunjukkan tidak adanya suatu dasar filosofis pendidikan yang dipahami dan diterima bersama di lingkungan institusi. Penelitian ini menemukan bahwa tidak diperoleh gambaran atau narasi yang konsisten tentang kebijakan atau perencanaan spesifik jangka panjang yang melandasi atau menuntun pelaksanaan Prodi PAI.

Secara garis besar, muatan kurikulum Prodi PAI PTKI di Indonesia, dapat dipetakan dalam tiga kompetensi: 1) Profesional, 2) Pedagogis, dan 3) Penunjang. Mahasiswa sebagai calon guru PAI diharapkan mempunyai kemampuan profesional sebagai guru agama Islam dan juga pedagogis sebagai guru. Namun demikian, dalam kurikulum Prodi PAI di berbagai LPTK, muatan profesional sebagai guru agama tidak lebih dari 30%. Sebaliknya, komposisi mata kuliah pedagogis rata-rata sekitar 45%. Lebih dari itu, kurikulum prodi PAI banyak mengandung "hal-hal teknis" kepengajaran (pedagogis), dan kurang pada penguasaan substansi keilmuan yang lebih dalam, kompetensi substansi keislaman. Sebagai contoh, mata kuliah al-Qur'an-Hadis dibedakan untuk SD/MI, al-Qur'an-Hadis untuk SMP/MTs, dan al-Qur'an-Hadis untuk MA/SMA/SMK. Sejauh ini, mata kuliah yang dikembangkan di Prodi PAI lebih berorientasi pada pemenuhan kebutuhan guru SD sampai SLTA. Idealnya kurikulum Prodi PAI harus juga merespons isu-isu agama kontemporer dan mengajarkan cara-cara beragama secara kritis.

Dalam konteks PTKI, PAI merupakan prodi agama dengan kategori peminat yang tinggi. Kondisi ini memungkinkan PAI tidak hanya saja menerima mahasiswa dalam jumlah banyak dalam setiap angkatan, tetapi juga berkesempatan memilih calon-calon mahasiswa yang memiliki kualifikasi akademik yang unggul. Pada dimensi ini, yaitu berkesempatan sangat bebas untuk memilih calon mahasiswa terbaik, Prodi PAI memiliki ruang sangat luas untuk merealisasikan visi dan misinya. Hal ini berbanding terbalik dengan prodi-prodi di lingkungan PTKI yang sepi peminat, sehingga siapa saja yang mendaftar "seolah-olah" harus diterima, sebagaimana juga berlaku untuk kampus-kampus

swasta yang menggantungkan beban biaya operasional kampusnya dari keberadaan mahasiswa.

Ketika mahasiswa yang diterima merupakan individu terpilih, keberadaan kurikulum menjadi salah satu faktor determinan dalam membentuk lulusan Prodi PAI sesuai dengan visi dan misinya; yaitu guru PAI yang memiliki pengetahuan keagamaan yang mendalam, berwawasan kebangsaan, dan memiliki kecakapan dalam proses pembelajaran. Namun banyak pihak yang beranggapan bahwa alumni Prodi PAI secara umum hanya unggul dalam kecakapan pedagogis, namun rendah dalam kemampuan pengetahuan keislamannya.

Lulusan Prodi PAI selama ini dinilai memiliki keunggulan dalam penguasaan teknis pembelajaran, seperti penguasaan metode dan pengembangan dan pemanfaatan media dan sumber pembelajaran. Adapun sisi kekurangan lulusan Prodi PAI adalah lemah dalam penguasaan materi kajian keislaman. Di antara faktor penyebab kondisi seperti ini adalah desain kurikulum yang dikembangkan Prodi PAI dan juga proses pembelajarannya yang terlihat memberikan porsi yang lebih banyak untuk pengembangan aspek teknis metodologi pembelajaran dibanding dengan penguasaan kajian keislamannya. Dengan kenyataan itu, berarti apa yang pernah dikritik oleh Azyumardi Azra belasan tahun silam masih dilaksanakan oleh Prodi PAI hingga sekarang. Azra menyatakan bahwa Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK), termasuk jurusan PAI, dianggap kurang berhasil mencetak calon-calon guru profesional. Menurutnya LPTK umumnya, termasuk jurusan PAI, masih menganut paradigma *technical based teacher education*, pendidikan keguruan yang berbasis hal-hal teknis tentang pengajaran. Sementara penguasaan substansi keilmuan yang lebih dalam, bahkan krusial bagi keberhasilan *transfer of knowledge* kepada peserta didik masih belum memadai bahkan cenderung diabaikan (Azra, 2002: 51).

Secara umum, perbandingan komposisi antara kompetensi pedagogis, materi keislaman, dan penunjang berkisar antara 50%-30%-20% atau 40%-40%-20%. Dengan melihat komposisi ini, tentu dapat dipahami mengapa alumni Prodi PAI cenderung lebih cakap dalam hal kompetensi pedagogis, dan cenderung rendah dalam kemampuan

keislaman.

Pada awalnya, Prodi PAI didesain untuk memenuhi kebutuhan guru agama Islam pada sekolah umum. Namun dalam perkembangannya, alumni Prodi PAI juga menjadi guru madrasah yang membutuhkan kemampuan luas dan mendalam dengan spesifikasi yang khusus, seperti kemampuan al-Qur'an-hadis, akidah-akhlak, sejarah kebudayaan Islam, fikih, dan bahasa Arab. Dengan melihat konten dan komposisi kurikulum, tampaknya kurang tepat jika alumni Prodi PAI menjadi guru keislaman di madrasah.

B. Input dan Rekrutmen Mahasiswa

Berdasarkan survei di 19 LPTK, mayoritas mahasiswa Prodi Pendidikan Agama Islam (PAI) masuk melalui jalur Mandiri (52,2%). Khusus untuk di PTKIN (PTKIS mayoritas hanya melalui jalur Mandiri), persentasenya adalah SPAN-PTKIN 43,5%, UM-PTKIN 32%, dan Mandiri 21,6%. Dari data ini diasumsikan bahwa proses PMB dengan jalur Seleksi Prestasi Akademik Nasional-Perguruan Tinggi Islam Negeri (SPAN-PTKIN) yang "hanya" menilai rapor dan nilai Ujian Nasional (UN) telah memberikan peluang lebih pada calon mahasiswa dari SMA/SMK umum yang memiliki nilai relatif lebih tinggi, sehingga kurang memberikan preferensi bagi alumni-alumni dari MA dan SMA Islam/Pesantren yang memiliki pengetahuan keagamaan yang cukup memadai. Selain itu, berdasarkan hasil temuan FGD mahasiswa, rata-rata motivasi mereka memilih Prodi PAI adalah karena keinginan menjadi guru serta untuk dakwah dan ibadah.

Pada umumnya rekrutmen penerimaan mahasiswa baru telah memberikan kesempatan yang sama bagi setiap calon mahasiswa baru dari berbagai latar belakang pendidikan, sosial, budaya, ekonomi dan etnis. Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN) menyelenggarakan lima jalur penerimaan mahasiswa baru, yakni SNMPTN, SBMPTN, SPAN-PTKIN, UM-PTKIN, dan Mandiri. Sejak 2015/2016, Prodi keagamaan, termasuk PAI, tidak lagi mengikuti jalur SNMPTN maupun SBMPTN. Kebijakan ini didasarkan pada hasil evaluasi bahwa ternyata mahasiswa yang diterima lewat jalur tersebut tidak memenuhi kualifikasi yang diharapkan karena sistem yang dikelola oleh Kemenristek-Dikti tersebut tidak ada materi tes keislaman dan bahasa Arab.

Sedangkan sistem PMB di PTKIS secara umum ada dua macam, yakni jalur prestasi dan jalur tes. Jalur prestasi merupakan jalur seleksi calon mahasiswa baru berdasarkan pada nilai rapor siswa yang diperoleh sejak semester 1 s/d 5 di tingkat SLTA dengan ketentuan minimal nilai rata-rata untuk semua mata pelajaran adalah 7 dan nilai Ujian Akhir Nasional. Selain itu, juga didukung dengan prestasi akademik dan non akademik lainnya yang dimiliki oleh siswa. Sedangkan untuk jalur tes biasanya menggunakan *Paper Based Test* (PBT) dan *Computer Based Tes* (CBT). Walaupun demikian, di banyak PTKIS, PMB bukan untuk menyeleksi tetapi sekadar semacam *placement test* karena hampir semua pendaftar diterima, termasuk lulusan SMA/SMK.

Secara keseluruhan, sistem dan jalur-jalur seleksi PMB belum sepenuhnya mampu menjaring calon-calon mahasiswa yang sesuai karakteristik Prodi PAI. Hal ini terlihat dari ketentuan dan instrumen yang digunakan yang belum sepenuhnya mampu menyeleksi calon mahasiswa dengan kualifikasi yang mencukupi sebagai calon mahasiswa PAI. Calon mahasiswa PAI idealnya memiliki bekal wawasan keislaman dan penguasaan bahasa Arab yang memadai. Di samping itu, mahasiswa juga memiliki kepribadian dan sikap keagamaan yang sesuai dengan tujuan Prodi PAI di PTKI. Kualifikasi itu diharapkan dapat menjadi bekal sebagai calon guru agama Islam, baik di sekolah maupun madrasah, yang memiliki kemampuan secara profesional di bidangnya.

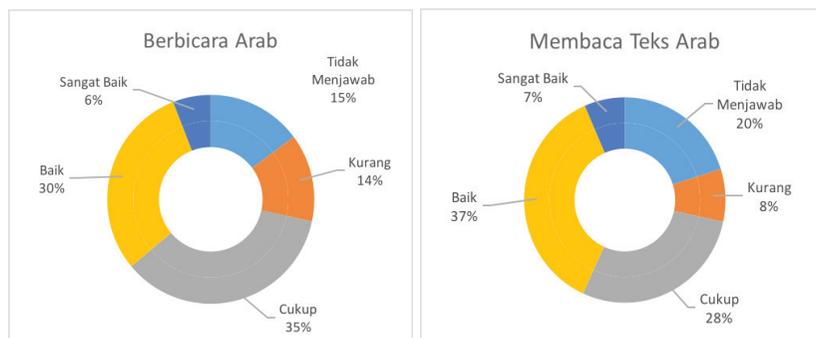
C. Kompetensi Bahasa Arab dan Keagamaan

Kompetensi Bahasa Arab Dosen

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen menyebutkan bahwa salah satu syarat untuk dapat menjadi dosen profesional seseorang wajib memiliki kompetensi dalam mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Secara umum dapat dirumuskan bahwa kompetensi dosen adalah hasil penggabungan dari beragam kemampuan, bisa berupa seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh dosen dalam menjalankan tugas profesionalitasnya. Pada pembahasan

ini, kompetensi dosen dilihat salah satunya dari aspek kemampuan penguasaan Bahasa Arab.

Berdasarkan survei, penguasaan bahasa Arab dosen PAI di PTKI didasarkan pada persepsi masing-masing dosen adalah, *pertama*, kemampuan berbicara bahasa Arab dosen dengan kriteria baik dan sangat baik hanya 36,1%. *Kedua*, persepsi dosen tentang kemampuan membaca teks Arab dengan baik dan sangat baik adalah 43,2%, sedangkan cukup dan kurang adalah 56,8%. Namun data itu belum sesuai dengan data di Rencana Pembelajaran Semester (RPS) karena mayoritas buku referensi dosen adalah buku-buku berbahasa Indonesia dan atau terjemahan. Ketika dikonfirmasi dengan mahasiswa di beberapa PTKI ternyata dosen dengan mata kuliah keislaman jarang sekali menggunakan referensi berbahasa Arab dalam proses perkuliahan, sehingga mahasiswa jarang mengakses dan menggunakan referensi yang berbahasa Arab.



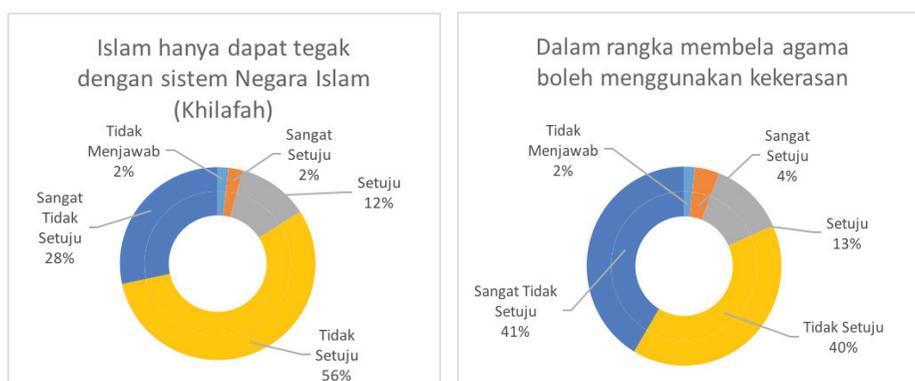
Gambar 1: Kompetensi Bahasa Arab Dosen

Berdasarkan **Gambar 1**, dapat disimpulkan bahwa rata-rata dosen Prodi PAI memiliki penguasaan bahasa Arab tergolong baik, yakni mencapai lebih dari 50%. Hasil temuan di lapangan, dosen-dosen keislaman Prodi PAI sebagian besar merupakan lulusan pesantren, dan bahkan tidak sedikit yang berlatar belakang pendidikan Timur Tengah, sehingga kemampuan berbahasa Arab dosen secara eksplisit tidak diragukan lagi.

Pandangan Keagamaan Dosen

KATEGORI	TIDAK MENJAWAB	SANGAT TINGGI	TINGGI	RENDAH	SANGAT RENDAH
Purifikasi	0%	3,6%	2,4%	66,9%	27,2%
Formalisasi Syariat Islam	1,2%	3,0%	28,4%	49,7%	17,8%
Anti Demokrasi	1,2%	0%	10,1%	69,2%	19,5%
Anti Agama Lain	0,6%	7,1%	29,0%	40,8%	22,5%
Anti Barat	0,6%	16,0%	24,3%	52,1%	7,1%
Kekerasan	1,2%	0,6%	2,4%	23,1%	71,8%

Gambar 2: Potensi Islamisme Dosen (N=169)



Gambar 3: Pandangan Keagamaan Dosen

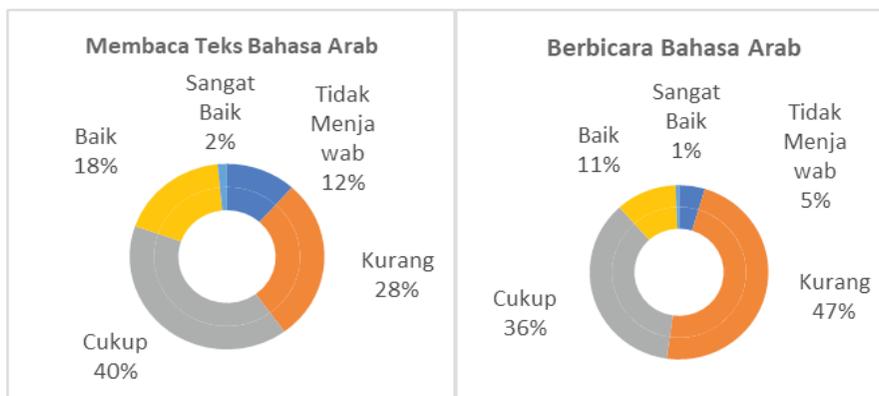
Pandangan keagamaan dosen memiliki peran yang sangat penting dalam proses KBM di kelas. Oleh karena itu, persepsi dosen terhadap isu-isu keagamaan menjadi hal yang signifikan mengingat pandangan mereka sangat berpengaruh terhadap pembentukan sikap keberagaman mahasiswa (calon guru) di dalam kelas.

Berdasarkan parameter islamisme Bassam Tibi, survei tentang pemahaman keagamaan dosen mendapatkan hasil yang cukup

menarik. Penerimaan dosen terhadap demokrasi tinggi (88,8%) dan penolakan terhadap kekerasan juga tinggi (95,9%). Jika dilihat dalam masing-masing butir pertanyaan, terdapat 13,0% dosen Prodi PAI yang setuju bahwa Islam hanya dapat tegak dengan negara Islam (khilafah) dan setuju bahwa dalam membela agama diperbolehkan menggunakan kekerasan 15,4%. Namun demikian survei juga mencatat bahwa level islamisme dosen relatif tinggi di beberapa parameter yaitu formalisasi Syariat Islam (31,4%), anti agama lain (36,1%), dan anti Barat (40,3%). Selain itu, dalam interview juga didapatkan beberapa data menarik seperti ada dosen yang tidak setuju cadar dilarang di kampus, atau bahwa cadar juga merupakan bagian dari hak mahasiswi.

Kompetensi Bahasa Arab Mahasiswa

Secara umum, mahasiswa PAI di PTKI menganggap bahwa sangat penting mahasiswa PAI menguasai bahasa Arab, baik kemampuan dalam berbicara dan membaca teks (termasuk menerjemahkan). Oleh karena itu, untuk meningkatkan kapasitasnya, mahasiswa PAI berusaha mengambil kursus bahasa Arab atau sengaja tinggal di pondok pesantren. Sebagian dosen PAI, menganggap bahwa minimnya penguasaan bahasa Arab mahasiswa sangat mengganggu dalam penyampaian materi pelajaran keislaman. Namun di sisi lain ada sebagian yang berpendapat sebaliknya, bahwa kemampuan bahasa Arab dianggap tidak terlalu penting, sebab saat ini materi-materi



Gambar 4: Kemampuan Bahasa Arab Mahasiswa PAI

keagamaan sudah banyak yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia.

Meskipun kompetensi bahasa Arab juga menjadi persoalan di prodi atau fakultas lain, namun mahasiswa Prodi PAI bisa dibilang tidak cukup menggembirakan. Sebab sebagai calon guru agama Islam, mahasiswa PAI dituntut mampu berbahasa Arab dengan baik. Dengan kompetensi bahasa Arab yang memadai, mahasiswa akan mampu mengakses pengetahuan keislaman langsung pada sumber utamanya.

Berdasarkan survei, kemampuan mahasiswa PAI PTKI hanya 11,5% yang mengaku mampu berbicara bahasa Arab dengan baik dan baik sekali. Artinya, mayoritas mahasiswa (88,4%) memiliki kapasitas kemampuan bahasa Arab cukup dan kurang.

Data survei ini terkonfirmasi melalui tes tertulis (dalam FGD) untuk mengujikemampuan membaca dan menerjemahkan teks bahasa Arab, bahwa hanya 38% mahasiswa yang mempunyai kompetensi bahasa Arab baik dan 54% mahasiswa mempunyai kemampuan membaca dan menerjemahkan bahasa Arab rendah. Kemampuan bahasa Arab yang rendah setidaknya akan berdampak untuk mendapatkan pengetahuan keislaman dari sumber-sumber utama dan berbagai informasi keislaman yang didapatkan tidak utuh.

Pandangan Keagamaan Mahasiswa

Terkait dengan parameter islamisme, survei terhadap pemahaman keagamaan mahasiswa cukup mengagetkan. Di satu sisi penolakan mahasiswa terhadap kekerasan atas nama agama tinggi (92,1%). Data di butir pertanyaan tentang Pancasila, 89,9% mahasiswa setuju bahwa Pancasila tidak bertentangan dengan nilai-nilai agama. Dalam hal toleransi, hasil survei menunjukkan bahwa mayoritas (94%) mahasiswa Prodi PAI setuju untuk bertetangga dengan orang beda agama. Namun demikian survei mencatat bahwa level islamisme mahasiswa tinggi di beberapa parameter yaitu formalisasi Syariat Islam (44,7%), anti demokrasi (45,5%), anti agama lain (42,9%), dan anti Barat (67,6%). Menarik juga jika dilihat dari masing-masing butir pertanyaan, misalnya terdapat 47,4% mahasiswa Prodi PAI yang setuju bahwa Islam hanya

Menanam Benih di Ladang Tandus:
Potret Sistem Produksi Guru Agama Islam di Indonesia

KATEGORI	TIDAK MENJAWAB	SANGAT TINGGI	TINGGI	RENDAH	SANGAT RENDAH
Purifikasi	1,1%	8,8%	20,7%	62,5%	6,8%
Formalisasi Syariat Islam	0,3%	5,0%	39,7%	48,7%	6,2%
Anti Demokrasi	0,2%	5,1%	40,4%	51,9%	2,2%
Anti Agama Lain	0,2%	4,9%	38,0%	43,3%	13,5%
Anti Barat	1,5%	27,9%	39,7%	28,7%	2,0%
Kekerasan	0,1%	2,0%	5,7%	32,4%	59,7%

Gambar 5: Potensi Islamisme Mahasiswa (N=981)

dapat tegak dengan negara Islam (khilafah), dan setuju bahwa keterpurukan Islam sebagai akibat dari skenario Barat 75,9%.

Pemahaman keagamaan mahasiswa di atas juga dikonfirmasi dalam FGD bahwa arus islamisme sudah merambah kalangan mahasiswa. Dalam FGD di beberapa PTKI didapatkan beberapa pemikiran, misalnya, bahwa gagasan Islam Nusantara dianggap merusak Islam dari dalam, bahwa demokrasi dianggap telah melemahkan Syariat Islam karena demokrasi adalah ciptaan manusia, bahwa Barat mempunyai agenda buruk terhadap Islam dan lain-lain.

Data kuantitatif di atas menunjukkan bahwa potensi Islamisme mahasiswa Prodi PAI cukup tinggi, yaitu level intoleran dan cenderung radikal. Data ini mengkonfirmasi penelitian-penelitian lain bahwa terdapat banyak celah masuknya paham radikalisme di Prodi PAI PTKI Indonesia.

D. Pendidikan Kritis

Pendidikan merupakan salah satu pilar penting dalam kehidupan bangsa. Masa depan suatu bangsa bisa diketahui melalui sejauh mana komitmen masyarakat atau bangsa dalam menyelenggarakan pendidikan nasional (Maarif, 2005: 89). Oleh karena itu, pendidikan menjadi faktor utama dalam penentu masa depan suatu bangsa. Pendidikan juga merupakan aspek kehidupan manusia yang sangat signifikan, sehingga diyakini sebagai modal utama sebuah bangsa

dalam mempertahankan eksistensinya, bahkan pendidikan dijadikan sebagai barometer peningkatan kualitas sumber daya manusianya.

Dalam kegiatan belajar mengajar (KBM), secara umum PTKI menyelenggarakan pembelajaran andragogi (pembelajaran orang dewasa). Dalam konteks KBM di Prodi PAI, kreativitas dosen diperlukan supaya mahasiswa memiliki pengetahuan profesional keagamaan dan pedagogis yang memadai, termasuk mengintegrasikan tema-tema aktual. Survei terhadap mahasiswa Prodi PAI mendapatkan data bahwa mayoritas dosen telah memasukkan materi tentang pentingnya toleransi (96%) dan bahaya ekstremisme dalam beragama (76,7%). Hal ini juga berarti bahwa sebagian dosen lain, yaitu sejumlah 22,4%, tidak menyampaikan materi tentang radikalisme.

Data di atas menjelaskan bahwa praktik pendidikan keagamaan belum memberi perhatian pada berbagai permasalahan kontemporer yang beredar di tengah masyarakat. Hal ini dapat dilihat berbagai permasalahan yang tengah dihadapi Prodi PAI. Dari temuan data di lapangan, misalnya, dalam kurikulum maupun silabus tidak ditemukan adanya pendidikan nalar kritis, sehingga mahasiswa cenderung berpikir sempit. Dalam pendidikan keagamaan sangat penting untuk diterapkan pendidikan kritis agar mahasiswa tidak mudah dipengaruhi paham-paham yang mengarah radikal atau ekstremis.

Mata kuliah *critical thinking* seperti Filsafat Ilmu dan Logika di sini tampak sangat diperlukan bagi mahasiswa Prodi PAI. Walaupun mata kuliah-mata kuliah ini sudah diajarkan, namun penekanannya yang diperlukan bukan pada pembahasan teoretis, melainkan lebih kepada penerapan praktis dalam mengajak mahasiswa berpikir kritis. Kemampuan kritis inilah pada gilirannya akan membantu mahasiswa dalam melihat dengan lebih jernih dan cermat informasi yang mereka peroleh, baik informasi-informasi yang didapat secara *online* maupun *offline*. Selain itu, perlu mata kuliah Studi Agama-Agama dan multi-kulturalisme agar mahasiswa PAI mampu memahami dinamika keagamaan serta kemajemukan negara Indonesia, bahwa Indonesia merupakan negara mayoritas berpenduduk muslim terbesar di dunia, namun bisa bersandingan dengan damai bersama pemeluk agama-agama lain.

E. Kegiatan Keagamaan di Lingkungan Kampus

Memasuki babak baru reformasi politik yang ditandai dengan adanya kebebasan berpendapat dan berkumpul, berbagai organisasi kemasyarakatan dan kemahasiswaan bermunculan di perguruan tinggi. Organisasi kemahasiswaan mampu menarik para mahasiswa baru, sehingga memiliki banyak pengikut di kalangan mahasiswa. Pada bagian ini akan diuraikan dinamika organisasi maupun kegiatan keagamaan dan kemahasiswaan baik intra maupun ekstra kampus di PTKI subjek penelitian ini.

Dinamika di lingkungan UIN Raden Intan Lampung menjadi contoh yang menarik, khususnya organisasi kemahasiswaan baru yang kini tengah berkembang dan memperoleh banyak perhatian untuk menarik anggota baru. Sebagaimana di perguruan tinggi Muhammadiyah lainnya, di Universitas Muhammadiyah Lampung (UML), hanya Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) yang boleh menjadi kegiatan intra kampus. Sedangkan di UIN Raden Intan terdapat tiga Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) intra kampus yang berkontestasi, yakni UKM Badan Pembinaan Dakwah Kampus (Bapinda) yang mengembangkan ideologi Tarbawi-tradisi ikhwanul muslimin, UKM Al-Ittihad yang mengembangkan ideologi salafi, dan UKM Permata Shawalat yang mengembangkan ideologi *ahlussunnah waljamaah-annahdliyah*.

Pertama, UKM Bapinda memiliki visi sebagai wadah perjuangan guna membina dan mengembangkan dakwah Islamiyah di lingkungan UIN Raden Intan Lampung dan masyarakat luas. Misinya antara lain sebagai proses pembinaan dan pengembangan dai, mengembangkan khazanah keilmuan untuk membangun umat, dan mengoptimalkan fungsi ilmu teknologi sebagai media dakwah. *Kedua*, UKM Al-Ittihad, yang pendiri dan motor penggerak utamanya adalah Ustadz Buchori Abdus Shomad (BAS), dosen Fakultas Ushuluddin, Koordinator GNPF MUI, pengurus MIUMI dan organisasi salafi lainnya. Relasi dan pengaruh BAS di kampuslah yang membuat UKM tersebut mudah berdiri sebagai organisasi intra kampus di tingkat universitas. UKM ini memiliki visi dan misi untuk membentuk mahasiswa cerdas intelektual dan cerdas spiritual berdasar al-Quran dan hadis. Adapun misinya adalah membumikan al-Quran dan hadis, menggali potensi mahasiswa untuk *izzul Islam wal*

muslimin, dan menjadi pelopor dalam membina *akhlakul karimah*, *ukhuwah Islamiyah* dan *ubudiyah*. Ketiga, UKM Persatuan Mahasiswa Pecinta Shalawat (Permata Shalawat). UKM ini didirikan sebagai respons atas makin kuatnya pengaruh UKM Bapinda dan UKM Al-Ittihad di kalangan mahasiswa UIN Raden Intan Lampung. UKM ini lahir di tengah hilangnya daya simpatik pimpinan kampus terhadap pendekatan demonstratif mahasiswa yang tergabung dengan PMII. Agar para mahasiswa yang berlatar belakang *Nahdliyin* tidak banyak terpapar oleh berbagai macam ideologi yang tidak selaras dengan ideologi *ahlussunah waljamaah*.

Kegiatan keagamaan di kota lain seperti di UIN Imam Bonjol (IB) Padang belum memperlihatkan upaya deradikalisasi yang benar-benar serius melalui proses pembelajaran. UIN IB dalam menguatkan keislaman mahasiswanya di antaranya ditempuh dengan cara memberikan bimbingan al-Qur'an dan kemudian hasilnya dibuktikan dengan Piagam *Tilawah*. Piagam tersebut merupakan syarat untuk dapat lulus dari UIN IB. Ada pula program bahasa Arab dan bahasa Inggris intensif. Semua mahasiswa baru UIN IB diberikan program selama dua semester untuk peningkatan bahasa oleh Pusat Bahasa. Selain itu, ada pula bimbingan baca tulis al-Quran khusus non-SKS oleh prodi. Di tingkat universitas juga dilakukan kegiatan LDQ (Lembaga Darul Qur'an) untuk membenahi bacaan al-Quran.

Tidak kalah dengan UIN IB, STAI-PIQ Padang menyaratkan kelulusan mahasiswa dengan hafalan enam Juz. Oleh karena itu, STAI-PIQ memberikan porsi mata kuliah *tahfiz* sebanyak 4 jam per minggu, sama porsinya dengan praktik mengajar. Untuk menunjang keberhasilan dalam menghafal juga disediakan asrama Ma'had Ali, agar mahasiswa dapat belajar dan praktik belajar berbahasa Arab dan hafalan dengan nyaman di ma'had. Di luar itu semua, mahasiswa memiliki banyak kegiatan keagamaan, termasuk studi kecil atau sering disebut *halaqah-halaqah (liqo')*.

Kegiatan keagamaan mahasiswa di Kalimantan Selatan juga berbeda. Atmosfer dan ethos religius yang kuat menimbulkan kepercayaan akan sumber daya religius dan kultural masyarakat Kalimantan Selatan. Salah satu alasannya adalah kepercayaan diri bahwa Kalimantan

Selatan masih merupakan wilayah yang aman dan jauh dari isu radikalisme dan intoleransi. Hal ini tampak dari kehidupan masyarakat di Kota Banjarmasin dan Martapura sebagai lokasi penelitian. Dalam beberapa FGD yang diikuti mahasiswa PAI di masing-masing PTKI, sikap keberagaman mahasiswa PAI di UIN Antasari dan IAI Darussalam pada umumnya bersifat terbuka dan moderat. Mahasiswa PAI memandang Islam di Indonesia adalah yang paling sesuai bagi mereka, toleransi sebagai nilai bersama yang harus dipegang, demokrasi dan negara adalah sistem yang terbaik untuk Indonesia, serta sikap saling terbuka dan menghargai antar pemeluk agama. Namun di saat yang sama, dengan semangat religius lokal *nahdliyin* juga muncul penolakan dan resistensi terhadap kebutuhan religius dari kelompok minoritas, seperti pendirian tempat ibadah pemeluk minoritas atau keberadaan aliran di luar *ahlussunah waljamaah*. Sikap seperti ini terlihat utamanya pada komunitas Muslim Martapura.

Sementara kehidupan keagamaan mahasiswa di Malang Jawa Timur yang menjadi lokasi penelitian lainnya ditemukan bahwa perlu melihat kembali kepada cita-cita ideal UIN Maliki Malang untuk membangun keterpaduan ilmu dan agama yang tidak semata-mata diwujudkan dalam bentuk kurikulum, melainkan juga pengembangan aspek spiritual, akhlak, ilmu dan profesionalisme, serta visi Prodi PAI untuk menjadi prodi terkemuka dalam menyiapkan tenaga pendidikan agama Islam yang berkarakter *Ulul Albab*. Hal ini juga sejalan dengan cita-cita Prodi PAI UNISMA untuk mencetak guru-guru agama Islam yang profesional, unggul, dan kompetitif di bidang IPTEK, beriman, bertakwa, dan ber-*akhlakul karimah* berdasarkan ajaran Islam *ahlussunah waljamaah* yang mengedepankan nilai-nilai yang inklusif dan toleran. Di sisi lain, mahasiswa Prodi PAI UNISMA juga menjunjung nilai-nilai NU yang moderat, bahwa UNISMA terlahir dari embrio warga *Nahdliyin* yang kuat.

Dari hasil survei tentang skema keberagaman mahasiswa baru di UIN Maliki Malang terhadap mahasiswa baru yang berjumlah 2.644 orang, 51% menyatakan pernah belajar di pondok pesantren, dan 49% tidak pernah. Satu temuan yang bisa dikatakan positif adalah bahwa lebih dari 90% mahasiswa baru memiliki pandangan keadilan,

penuh toleransi, dan didasari oleh kemampuan melakukan pilihan keberagaman secara nasional. Namun demikian, sebanyak 19% mahasiswa memiliki potensi intoleransi. Dari jumlah total survei, 29,3% mahasiswa menyatakan akan membela sampai mati ajaran agamanya, dan sebanyak 18% mahasiswa menyatakan bahwa memerangi orang kafir adalah puncak jalan ke surga.

Dari berbagai dinamika keagamaan di atas, dapat disimpulkan bahwa di satu sisi dapat dikatakan bahwa kegiatan-kegiatan keagamaan di kampus diindikasikan memiliki potensi pengaruh Islamisme, namun pada beberapa kegiatan lainnya hanya masih sebatas konservatisme agama. Oleh karena itu, pelan tetapi pasti, jika kondisi seperti ini tidak segera diatasi, maka gelombang arus Islamisme juga akan semakin meluas, walaupun beberapa kampus sudah mulai memproteksi agar tidak mudah terpapar dengan berbagai pengaruh yang mengarah kepada gerakan Islamisme.

F. Memudarnya Moderatisme Beragama

Tantangan Islamisme memiliki jejak historis yang lama dengan jaringan aktor dan keorganisasian di dalam kampus, bahkan tidak sedikit dari para aktor atau tokoh Islamisme dari lingkungan kampus. Minimnya pemahaman dan kesadaran kampus tentang peta gerakan radikalisme melemahkan mekanisme ketahanan di Perguruan Tinggi dalam menghadapinya. Selama ini belum ada kebijakan khusus yang dibuat oleh pihak perguruan tinggi untuk menghadapi penetrasi paham dan gerakan radikal bahkan ekstremis. Namun demikian, pihak perguruan tinggi sekarang ini tampaknya sudah berusaha menanggulangi berbagai resiliensi sosial dalam menginisiasi beberapa program anti radikalisme, ekstremisme dan intoleransi.

Terkait fenomena berseminya arus Islamisme di Prodi PAI, setidaknya ada beberapa fenomena yang menarik untuk dicermati, yaitu pandangan terhadap Syiah dan Ahmadiyah, memilih pemimpin non-muslim, pandangan terhadap Barat, penggunaan cadar atau jilbab besar bagi wanita, dan tentang didirikannya negara Islam. Memahami pandangan semacam ini mengindikasikan bahwa para mahasiswa sudah terhegemoni oleh potensi arus Islamisme secara

bebas dan aktif dalam keterlibatan mereka dalam berbagai kajian-kajian, seperti pengajian, *halaqah*, dan semacamnya.

Kemunculan organisasi kemahasiswaan yang baru juga mendorong praktik keberagamaan yang baru. Penggunaan cadar menjadi salah satu praktik keberagamaan yang penting untuk mendapat perhatian. Menurut penuturan salah seorang mahasiswi di UIN Raden Intan Lampung yang bercadar, misalnya, bahwa sebelumnya ia tidak menggunakan cadar, karena tumbuh di lingkungan keluarga yang tidak terlalu ketat dengan nilai-nilai keagamaan. Ia menggunakan cadar, selain karena sering diajak teman kakak tingkat untuk mengikuti pengajian mingguan salah satu UKM di kampus yang banyak diikuti mahasiswi bercadar, juga karena adanya dorongan berselancar di dunia media sosial, terutama akun instagram MUMO (*muslimah motivation*) yang diperoleh dari grup *whatsapp*. Menurut pengakuannya, menggunakan cadar menjadikannya nyaman. Ia juga merasa memperoleh banyak teman, apalagi perempuan-perempuan di kampusnya semakin banyak yang memakai cadar.

Sementara di UIN Mataram, saat ditanya tentang kemungkinan terpaparnya radikalisme di kalangan mahasiswa PAI, baik dosen dan pimpinan menyebutkan indikator terpaparnya dengan simbol cadar. Di antara mahasiswi Prodi PAI di UIN Mataram lebih banyak yang menggunakan cadar daripada mahasiswa prodi lainnya. Berdasarkan data yang diperoleh, di UIN Mataram ada 75 cadaris, 45 orang di antaranya (60%) dari Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, dan dari 45 tersebut 14 (31%) di antaranya dari PAI.

Sedangkan di salah satu PTKI swasta, para pimpinan justru tidak setuju jika cadar dijadikan sebagai indikasi seseorang terpapar radikalisme. Salah satu hasil wawancara dengan pimpinan, bahwa imaginasi pakaian bagi mahasiswa perempuan adalah dengan menggunakan *niqab*. Agak berbeda dengan pendapat tersebut, pimpinan lainnya berpendapat bahwa imaginasi pakaian ideal di Indonesia adalah yang penting menutup aurat. Terkait cara menutupnya terserah dan sebaiknya di Indonesia adalah seperti sekarang dengan keragaman dalam cara berpakaian muslimahnya. Di PTKI tersebut, ada nama-nama hijrah setelah pakai *niqab*. Nama-nama hijrah ini ada yang didapatkan

dari ustazahnya dan ada yang membuat sendiri. Salah satu mahasiswi PAI bercadar mengatakan bahwa setelah hijrah dia mempunyai nama baru, *Sagita*, yang merupakan akronim dari *Sabar*, *Giat*, dan *Taat*. Adapun pemahaman bahwa *niqab* adalah simbol ke-*kaffah*-an dan kewajiban berdakwah mendorong pemakainya untuk mengajak teman-temannya memakai *niqab* dengan memberikan hadiah *niqab* pada hari ulang tahun, misalnya.

Adapun di PTKI Swasta lainnya secara *de facto* tidak melarang mahasiswa bercadar. Selain itu, untuk mahasiswa putra juga ada yang penampilannya agak berbeda dengan yang lain, misalnya berjanggut dan memakai celana congklang. Selama ini perguruan tinggi telah bekerja sama dengan berbagai *ma'had-ma'had* yang ada di sekitarnya, yang sebagian besar para santriatinya menggunakan cadar. Mengenai alasan kampus tersebut menerima para mahasiswi berlatar belakang seperti itu, menurut penjelasan pimpinan, bahwa perguruan tinggi hadir di tengah-tengah masyarakat antara lain untuk ikut serta membina peserta didik dari latar belakang yang mengarah eksklusif dan ekstrem. Asumsi tersebut adalah jika anak-anak tersebut dihindari dan dimusuhi, mereka nantinya justru akan cenderung radikal. Oleh karena itu, mereka harus dibina dan dirangkul agar mereka bisa terbuka dan moderat.

Jika dilihat dari beberapa contoh di atas, pergolakan pemikiran yang menjadi kecenderungan di dunia akademik, tampaknya kini mulai memudar, bahkan melemah. Moderatisme yang selama ini menjadi penopang dan pemikiran keagamaan di perguruan tinggi, kini seakan-akan sudah mulai tergerus ke arah yang cenderung konservatif bahkan radikal. Hal ini diperparah dengan berbagai semangat sebagian mahasiswa dan dosen yang ingin memperjuangkan Islamisme dan menggeser sistem NKRI dalam relasi masyarakat di masa yang akan datang.

IV. TANTANGAN ISLAMISME

Arus Islamisme bisa dilihat pada sikap purifikasi dan konservatisme, keinginan untuk melaksanakan formalitas syariat Islam, anti demokrasi, hingga penanganan masalah dengan menggunakan kekerasan.

Namun, untuk mendefinisikan Islamisme secara gamblang tidaklah mudah. Semakin sering istilah Islamisme dipakai oleh banyak sarjana dan pengamat, semakin banyak pula definisinya.

Secara umum, istilah Islamisme muncul sebagai pengganti terhadap istilah fundamentalisme yang cenderung stigmatis dan juga istilah Islam politik. Secara umum, Olivier Roy (2004) mendefinisikan Islamisme sebagai nama baru politik Islam modern yang ingin menciptakan sebuah masyarakat Islam (*ummah*) tidak hanya dengan memaksakan syariat, tetapi juga dengan membangun negara Islam melalui aksi-aksi politik. Sedikit berbeda, Mohammad M. Hafez (2003) mendefinisikan Islamisme sebagai gerakan Muslim yang merasa berkewajiban untuk bertindak berdasarkan keyakinan bahwa Islam itu aktivisme sosial dan politik, baik untuk membangun negara Islam, menghidupkan kembali semangat beragama, atau untuk menciptakan persatuan bagi Muslim. Terakhir, Bassam Tibi (2012) menjelaskan bahwa Islamisme adalah sebuah pemahaman baru (bukan tradisi) di dunia Islam yang bertujuan untuk membangkitkan kembali umat Islam (*ummah*) dan politik totaliter dengan memobilisasi komunitas yang dibayangkan (*imagined community*) melalui penggunaan politik identitas. Lebih lanjut Bassam Tibi menjelaskan bahwa Islamisme adalah sebuah gerakan yang mempunyai visi tatanan dunia berdasarkan agama yang dipolitisasi dan berkomitmen menggunakan kekerasan. Adapun Bassam Tibi (2012) memberikan batasan Islamisme dalam enam kategori sebagai berikut: 1) purifikasi Islam, 2) syariat Islam, 3), anti-demokrasi, 4) anti agama lain, 5) anti Barat, dan 6) kekerasan.

Dilihat dari beberapa definisi di atas, Islamisme merupakan pemahaman agama (Islam) dalam bentuk tatanan sebuah negara, yaitu keinginan untuk mendirikan negara Islam. Kelompok Islamisme telah mengidolakan Islam pada zaman Nabi Muhammad SAW di Madinah, dan mereka juga berupaya untuk mengembalikan praktik berislam pada zaman sekarang untuk kembali seperti zaman empat abad yang lalu (Tibi, 2016: 292). Ide utama dibentuknya gerakan Islamisme adalah sebagai suatu gerakan yang ingin mengembalikan Islam seperti yang dipraktikkan pada zaman Rasulullah. Islam yang kemudian mereka usung kemudian dipandang sebagai praktik Islam

yang dianggap benar, tidak salah, tidak bisa ditawar, tidak bisa diubah, tidak ada unsur Barat, betul-betul dari Tuhan dan tidak dipengaruhi oleh pemikiran manusia. Islamisme hanyalah model praktik berislam pada zaman Rasulullah, selainnya adalah praktik berislam yang ditolak, alias *bid'ah* (Mahmudah, 2018: 2).

Secara historis, asal usul Islamisme yang muncul sebagai akibat krisis dunia Islam dapat ditelusuri sejak lahirnya *al-Ikhwan al-Muslimun* di Mesir,¹ sebagai titik awal gerakan Islamis pada tahun 1928 M. Kemudian gerakan ini menyebar ke seluruh dunia Muslim, termasuk Indonesia dalam rangka dekolonisasi. Dilihat dari tonggak sejarah Islamisme di Mesir, misalnya, prestasi terbesarnya adalah melatih dan mencetak guru-guru masa depan yang akan mengibarkan bendera Islamisme di ruang-ruang kelas mereka (Bayat, 2012: 8).

Selain itu, munculnya gerakan Islamisme pada tahun 1928 disebabkan adanya tarik menarik dengan relasi kuasa yang ada pada masa itu. Kelompok Islamisme merupakan kelompok Muslim yang pertama ada di Indonesia, jauh sebelum Pos-Islamisme yang baru muncul sekitar tahun 1970-an. Kelompok Islamisme yang berpandangan bahwa Islam adalah agama yang paling sempurna dibanding agama lain yang ada, syariatnya murni dari Allah, dan bisa menjadi alternatif untuk menolak praktik kuasa yang menurut mereka tidak Islami di Indonesia.

Kelompok Islamisme mempertahankan sebuah pemahaman bahwa Islam adalah agama dan negara. Negara tidak memiliki fungsi lain kecuali untuk mempraktikkan ritus-ritus agama. Oleh karena itu, anggapan-anggapan terhadap syariat Islam terus diwacanakan yang menimbulkan kesan represif dan menyimpang dari hakikat syariat itu sendiri. Salah satu yang menonjol di era reformasi demokrasi hingga saat ini adalah menguatnya Islam identitas. Sejumlah kecenderungan menunjukkan meningkatnya dukungan terhadap agenda-agenda politik yang bernuansa Islamisme. Salah satunya yang paling kentara yaitu dukungan terhadap implementasi syariat Islam dalam regulasi negara.

¹ Visi *al-Ikhwan al-Muslimun* adalah negara Islam berbasis syariah sebagai tatanan politik yang menjadi ciri mendasar Islamisme (Tibi, 2016: 20).

Bentuk ekspresi menguatnya Islamisme yang lain adalah meningkatnya aktivisme kelompok-kelompok intoleran yang memperjuangkan sistem kenegaraan lain di luar NKRI. Salah satu kelompok Islamis yang gencar menyebarkan konsep khilafah adalah Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Salah satu sasaran utama mereka dalam ekspansinya adalah generasi muda, terutama para pelajar dan mahasiswa, karena mereka lebih mudah untuk dipengaruhi (PPIM, 2018). Selain itu, ekspansi gerakan Islamisme di Indonesia kini juga telah merambah dan menjangkit berbagai kampus. Ideologi yang mereka bangun tidak lain adalah ingin menjadikan Indonesia berasaskan syariat Islam, dengan kata lain ingin mengubah ideologi negara dengan “khilafah”. Dari berbagai kampus yang dijadikan sebagai subjek penelitian, ditemukan beberapa indikasi adanya pengaruh Islamisme. Salah satu indikasi yang kentara salah satunya adalah “menumpang” pada beberapa unit kegiatan mahasiswa (UKM) kampus yang digunakan sebagai alat untuk menyebarkan paham mereka. Islamisme dengan pendekatan jihadi belum terlalu tampak kuat, dinamikanya masih berupa pendekatan keagamaan *tarbawi* dan *salafi*.

Salah satu indikasi yang kentara yaitu adanya dukungan untuk melaksanakan syariat Islam cenderung sangat tinggi di kalangan guru dan dosen (69%). Dukungan bagi pemerintah menerapkan syariat Islam harus dilihat lebih jauh menyangkut apa yang telah mereka pahami tentang syariat Islam itu sendiri, dan sejauh mana keterlibatan pemerintah di dalamnya. Dukungan terhadap penerapan syariat oleh pemerintah sejatinya tidak lepas dari pergeseran perilaku dan gaya hidup masyarakat Islam yang meningkat ketertarikannya kepada hal-hal yang bernuansa Islam, seperti busana muslim, makanan halal, pengobatan Islami, perekonomian Islami, dan sejumlah aspek kehidupan sosial lainnya (PPIM, 2018).

Dari hasil survei terhadap dosen-dosen dan mahasiswa PAI UIN Maulana Malik Ibrahim (Maliki) Malang, misalnya, terlihat bahwa mereka memiliki pandangan yang bisa dikatakan terbuka. 90% dosen dan 92% mahasiswa mengatakan tidak setuju bahwa Islam hanya bisa ditegakkan dengan sistem *khilafah*. Selain itu, 90% dosen dan 96% mahasiswa juga tidak setuju penggunaan kekerasan fisik untuk

menegakkan negara Islam. Pandangan inklusif ini tercermin juga melalui pandangan mereka dalam kehidupan bertetangga, 90% dosen dan 98% mahasiswa menyatakan bahwa bertetangga dengan orang yang beda agama tidak menjadi persoalan.

Sebagaimana di UIN Maliki, hampir seluruh dosen PAI UNISMA memiliki pandangan keislaman yang inklusif. Dari hasil survei, 100% dosen PAI UNISMA mengaku tidak setuju dengan argumen bahwa Islam hanya dapat tegak dengan sistem khilafah, dan 90% setuju bahwa sistem pemerintahan Indonesia bukan sistem yang tidak Islami dan oleh karena itu harus ditaati. Hal ini juga sejalan dengan pandangan mereka yang 100% tidak setuju dengan penggunaan kekerasan fisik untuk menegakkan negara Islam. Pandangan yang inklusif ini tercermin juga dalam pandangan mereka dalam kehidupan bertetangga. Mayoritas dosen (90%) mengatakan bahwa bertetangga dengan orang berbeda agama tidak menjadi masalah.

Namun, lain halnya dengan respons mahasiswa Prodi PAI UNISMA. Meskipun mereka sejalan dengan pendapat dosen-dosen tentang larangan penggunaan kekerasan fisik untuk menegakkan negara Islam dan inklusifitas dalam bertetangga dengan orang yang berbeda agama, namun mereka cukup berbeda dalam beberapa hal lainnya. Terdapat 26% mahasiswa yang mengatakan bahwa pemerintah Indonesia adalah tidak Islami. Hal ini juga hampir senada dengan pandangan 28% mahasiswa bahwa Islam hanya bisa tegak dengan sistem *khilafah*. Selain itu, terdapat 30% mahasiswa yang tidak mengakui Ahmadiyah dan Syiah sebagai muslim.

Mengapa dan dari mana mahasiswa PTKI di Indonesia bisa memiliki pandangan keagamaan yang mengarah pada Islamisme? Dari beberapa hasil survei dan temuan di lapangan, paham radikal mulai merambah dan menyemaikan pahamnya ke kampus melalui mahasiswa yang bukan berasal dari pondok pesantren. Para mahasiswa ini mencari berbagai informasi keagamaan melalui media sosial (medsos) dan kurang mengerti sumber-sumber yang otoritatif. Para mahasiswa yang ingin kembali pada "identitas muslim" ini kemudian memulai mengekspresikan bentuk kesalahannya melalui hal-hal yang bersifat fisik, seperti penggunaan cadar (*niqab*) bagi perempuan,

celana congklang dan berjenggot bagi laki-laki, dan lain sebagainya.

V. KESIMPULAN

Program Studi PAI sebagai produsen calon guru agama di sekolah dijalankan dengan berbagai kelemahan dan kekurangan. Di tengah derasnya arus Islamisme yang semakin kuat, Prodi PAI belum mampu mencetak calon guru agama Islam yang professional dan berpandangan moderat. Dari riset ini, ditemukan berbagai kekurangan pada Prodi PAI di PTKI di Indonesia. Beberapa kekurangan tersebut di antaranya: 1) input dan rekrutmen mahasiswa Prodi PAI masih memberikan peluang besar bagi lulusan SMA/SMK umum yang notabene kurang memiliki latarbelakang agama yang kuat, 2) desain kurikulum yang masih menekankan aspek pedagogis daripada penguasaan keilmuan keislamannya, 3) proses pembelajaran yang belum mencapai nalar kritis pada mahasiswa, 4) kompetensi dosen masih belum seutuhnya memadai baik dari sisi kompetensi bahasa Arab maupun keagamaan, 5) munculnya gejala-gejala Islamisme di sebagian dosen maupun mahasiswa, dan 6) lingkungan kampus yang kurang kondusif untuk pembelajaran. Fakta-fakta tersebut sebenarnya memberikan peluang untuk memperkuat nilai-nilai toleransi dan moderatisme dalam pembelajaran PAI di PTKI, untuk memastikan Indonesia sebagai negara yang aman, damai dan toleran.

Temuan penelitian ini juga menunjukkan bahwa daya berpikir kritis di Perguruan Tinggi telah kehilangan kekuatannya, ketika berhadapan dengan tantangan Islamisme yang semakin menguat. Pola pemikiran yang kritis yang menjadi ciri khas dunia akademik, kini bisa dikatakan seolah-olah kehilangan daya tahannya, sehingga dosen maupun mahasiswa (calon guru) mudah terpapar gelombang arus Islamisme. Hasil penelitian ini menunjukkan juga beberapa stigma negatif menguatnya Islamisme, di antaranya adalah sikap anti terhadap Barat dan agama lain cenderung lebih tinggi. Kondisi ini perlu mendapatkan perhatian khusus berbagai pihak, agar tidak mengancam keutuhan negara Indonesia. Oleh karena itu, dibutuhkan guru agama (PAI) yang memiliki kompetensi agama yang kuat untuk menangkal penyebaran paham intoleransi dan radikal di sekolah-sekolah umum, khususnya SLTA.

Rekomendasi

- 1) Perlunya penyempurnaan sistem seleksi calon mahasiswa baru. Adapun hal-hal yang perlu diperbaiki terkait sistem seleksi calon mahasiswa baru di antaranya, yaitu: *pertama*, jalur prestasi dengan kriteria yang digunakan perlu disesuaikan dengan kualifikasi profil lulusan Prodi PAI. *Kedua*, kualitas instrumen tes sistem seleksi melalui jalur tes harus baik dan materi yang diujikan dapat mengukur kemampuan penguasaan keislaman yang kuat. *Ketiga*, perlu instrumen untuk mengukur aspek kecenderungan sikap keagamaan mahasiswa agar diperoleh calon peserta didik yang memiliki pemahaman keagamaan yang moderat.
- 2) Perlunya penyempurnaan desain kurikulum. Berdasarkan hasil penelitian ini ditemukan salah satu kelemahan kurikulum Prodi PAI adalah komposisi yang secara umum masih memberikan porsi lebih besar pada penguasaan pedagogis daripada penguasaan keislamannya.
- 3) Perlunya menanamkan sikap kritis dan moderasi beragama, misalnya dengan menambahkan muatan mata kuliah Studi Agama-Agama, Multi-kulturalisme, Perbandingan Mazhab, dan mata kuliah yang relevan lainnya. Selain itu, perlu menambahkan beberapa bekal kemampuan nalar kritis seperti mata kuliah keislaman kritis, logika atau ilmu mantik.
- 4) Adanya kelemahan dalam proses pembelajaran yang selama ini kurang melatih kemampuan kritis mahasiswa. Oleh karena itu, dalam proses perkuliahan dosen perlu mengajak dan melatih mahasiswa agar bisa berpikir kritis dengan menerapkan strategi yang tepat dalam pembelajaran.
- 5) Proses pembelajaran harus mengajarkan tema-tema aktual kebangsaan dan kontekstual dan mengedepankan proses pembelajaran andragogi.
- 6) Peningkatan kemampuan bahasa Arab bagi mahasiswa yang masih memiliki kemampuan di bawah rata-rata. Upaya ini diasumsikan untuk memperkuat dan mengefektifkan pembelajaran bahasa di level prodi dan mewajibkan mahasiswa pada beberapa mata kuliah

minimal satu referensi berbahasa Arab sebagai rujukan pembacaan maupun tugas kuliah.

- 7) Dengan menguatnya gejala atau arus Islamisme di kalangan dosen dan mahasiswa, perlu kebijakan kampus untuk mengembangkan moderatisme keagamaan yang kuat. Oleh karena itu perlu adanya pengontrolan, pengidentifikasian, dan pembinaan lebih mendalam utamanya di kalangan mahasiswa. Hal ini dilakukan sebagai upaya penanggulangan gejala Islamisme di kalangan mahasiswa yang perlu dilakukan mulai dari proses seleksi calon mahasiswa, proses pembelajaran, dan ketika mereka akan lulus studi sebagai calon guru-guru agama yang profesional dan moderat.

DAFTAR PUSTAKA

- Afadlal, dkk. 2005. *Islam dan Radikalisme di Indonesia*. Jakarta: LIPI Press.
- Apple, Michael W. 1979. *Ideology and Curriculum*. London: Routledge.
- Aryanti, Zuzy, Imam Mustofa, dkk. 2015. "Persepsi dan Resistensi Aktivis Muslim Kampus terhadap Paham dan Gerakan Islam Radikal: Studi Kasus Perguruan Tinggi di Provinsi Lampung." *Jurnal Penamas* 28 (2)..
- Azra, Azyumardi. 2002. *Paradigma Baru Pendidikan Nasional: Rekonstruksi dan Demokrasi*. Jakarta: Kompas Media Nusantara.
- Balai Litbang Agama Semarang. 2017. *Policy Brief: Langkah Strategis Membina Rohis*. 3 (1).
- Barnes, L. Phillip. 2014. *Education, Religion and Diversity: Developing a New Model of Religious*. Oxon: Routledge.
- Bayat, A. 2012. *Pos-Islamisme*, terj. Faiz Tajul Milah. Yogyakarta: LKiS.
- Chisholm, I. Marquez. 2014. "Preparing Teachers for Multicultural Classrooms." *The Journal of Educational Issues of Language Minority Students* 14: 43-68.
- Cush, D. And Francis, D. 2002. "Positive Pluralism" to Awareness Mystery and Value: a Case Study in Religious Education Curriculum Development." *British Journal of Religious Education* 24 (1).
- Daud, Alfani. 1997. *Islam dan Masyarakat Banjar: Deskripsi dan Analisa Kebudayaan Banjar*. Jakarta: PT Radja Grafindo.
- Hasani, Ismail (ed.). 2009. *Berpihak dan Bertindak Intoleran: Intoleransi Masyarakat dan Retriksi Negara dalam Kebebasan Beragama/Berkeyakinan di Indonesia*. Jakarta: Pustaka Masyarakat Setata.
- Hikam, Muhammad AS. 2016. *Deradikalisasi: Peran Masyarakat Sipil*

- Membendung Radikalisme*. Jakarta: Kompas.
- Hefener, Robert W. 2000. *Civil Islam: Muslims and Democratization in Indonesia*. Princenton: Princenton University Press.
- Jackson, Robert. 2004. *Rethinking Religious Education and Plurality, Issues in Diversity and Pedagogy*. London: Routledge Falmer.
- Lukens-Bull, Ronald A. 2001. "Two Sides of the Same Coin: Modernity and Tradition in Islamic Education in Indonesia." *Anthropology & Education Quarterly*.
- Mahmudah, Siti. 2018. "Islamisme: Kemunculan dan Perkembangannya di Indonesia." *Jurnal Aqlam* 3 (1).
- Mu'arif. 2005. *Wacana Pendidikan Kritis Menelanjangi Problematika Meretas Masa Depan Pendidikan Kita*. Yogyakarta: IRCiSoD.
- Muhani, Saiful. 2007. *Muslim Demokrat: Islam, Budaya Demokrasi, dan Partisipasi Politik di Indonesia Pasca Orde Baru*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Muslim, Abdul Aziz dkk. 2018. *Menjaga Benteng Kebinekaan di Sekolah: Studi Kebijakan OSIS di Kota Padang, Kab. Cirebon, Kab, Sukabumi, Kota Surakarta, Kota Denpasar, dan Kota Tomohon*. Jakarta: Maarif Institut for Culture and Humanity.
- PPIM UIN Jakarta. 2016. *Policy Brief: Tanggung Jawab Negara terhadap Pendidikan Agama Islam*. Jakarta: PPIM.
- PPIM UIN Jakarta. 2016b. *Paham Eksklusif dalam Pendidikan Islam: Bahan Ajar Pendidikan Agama Islam Untuk Sekolah*.
- PPIM UIN Jakarta. 2018. "Sikap dan Perilaku Keberagamaan Guru dan Dosen Pendidikan Agama Islam." *Convey Report* 1 (8).
- Qohar, Abdul. 2011. "Arah Gerakan Sosial Kelompok Fundamentalisme Salafi Lampung." *Jurnal TAPs*, 7(13).
- Salim HS, Hairus. Najib Kailani. dan Nikmal Azekiyah. 2011. *Politik Ruang Publik Sekolah: Negosiasi dan Resistensi di SMUN di Yogyakarta*. Yogyakarta: Centre fo Religious and Cross-Cultural Studies (CRCS) UGM.

CONVEY Indonesia
CISForm UIN Yogyakarta - PPIM UIN Jakarta

Tibi, Bassam. 2016. *Islamism and Islam, diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan judul: Islam dan Islamisme*. Bandung: Mizan.

Ulrich Wagner, Andreas Zick. 2010. "The Relation of Formal Education to Ethnic Prejudice: Its Reliability, Validity and Explanation." *The European Journal of Social Psychology* 25 (1).

Wahid Foundation. 2016. *Potensi Radikalisme di Kalangan Aktivis Rohani Islam Sekolah-Sekolah Negeri*.

TENTANG CISFORM

Center for the Study of Islam and Social Transformation (CISForm) adalah lembaga penelitian di Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta yang bergerak di bidang studi Islam dan transformasi sosial. Sebagai lembaga penelitian, CISForm mengembangkan penelitian interdisipliner dan mengkaji berbagai isu-isu aktual dalam konteks Indonesia, khususnya yang terkait dengan proses modern-transformasi sosial yang terus bergulir. Laju modernisasi dan globalisasi disertai pergeseran keragaman dan rasionalitas telah membuka ragam peluang bagi kemajuan sosial, ekonomi, dan budaya.

CISForm memposisikan diri sebagai pusat penelitian interdisipliner yang berminat pada isu-isu multikulturalisme, dialog antar agama, radikalisme, ekstremisme serta pertentangan antara Islam dan budaya lokal. CISForm juga sangat memperhatikan keragaman permasalahan sosial yang menghantui lingkup luas dalam masyarakat muslim di Indonesia, seperti: kemiskinan, keterbelakangan, dan kekerasan.

CISForm terus berkontribusi dalam menjadikan Islam sebagai agama mayoritas di Indonesia agar mampu berkiprah dalam mengarungi dan mengatasi permasalahan tersebut. Lembaga ini juga mengembangkan program-program yang menghasilkan publikasi berupa buku, jurnal, dan karya-karya lain yang dapat diakses para akademisi secara luas, baik dalam maupun luar negeri. Publikasi tersebut diharapkan dapat memperkuat studi keislaman secara umum dan UIN Sunan Kalijaga secara khusus dalam percaturan wacana agama dan proses transformasi sosial. Pemahaman yang komprehensif dan mendalam mengenai isu-isu tersebut akan memberikan landasan yang kukuh bagi lahirnya solusi alternatif melalui berbagai program advokasi, pembelajaran, dan pemberdayaan komunitas. Sebagai upaya pengembangan program dan kegiatan, CISForm juga

CONVEY Indonesia
CISForm UIN Yogyakarta - PPIM UIN Jakarta

membangun kerja sama yang solid dengan pusat dan lembaga riset, LSM, instansi pemerintah, dan lembaga-lembaga internasional lainnya. Perhatian yang penuh dari lembaga-lembaga tersebut terhadap isu-isu terkini di Indonesia akan menjadi modal penting bagi CISForm dalam membangun kerja sama yang saling bermanfaat.



Fostering the Role of Religious Education
in Countering Violent Extremism in Indonesia

Gedung PPIM UIN Jakarta, Jalan Kertamukti No. 5, Ciputat Timur, Tangerang Selatan,
Banten 15419 Indonesia
Tel: +62 21 7499272 | Fax: +62 21 7408633 | Email: pmu.convey@gmail.com
Website: <https://conveyindonesia.com>

Collaborative Program of:

